

**INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA PEKALONGAN
2018**

<https://pekalongankota.bps.go.id>





**INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA PEKALONGAN
2018**

No. Katalog : 4102002.3375
ISBN : 978-602-6415-38-7
No. Publikasi : 33750.1910
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 40
Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik BPS Kota Pekalongan
Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik BPS Kota Pekalongan
Diterbitkan oleh : BPS Kota Pekalongan
Dicetak oleh : Aura Grafika (Cetakan I : Desember 2019)

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018
TIM PENYUSUN**

Pengarah : Eddy Prawoto

Penanggungjawab : Agus Miftah

Penyunting : Agus Miftah

Penulis : Diah Tri Pujiastuti

<https://pekalongankota.bps.go.id>

<https://pekalongankota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya hingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan Tahun 2018 dapat terwujud.

Publikasi ini berisi gambaran tentang tingkat kemajuan pembangunan manusia yang telah dicapai oleh Kota Pekalongan selama periode 2014 – 2018 beserta komponen-komponennya yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, serta hal lainnya yang terkait.

Dengan diterbitkannya IPM ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengambil kebijakan pembangunan khususnya pembangunan manusia pada masa yang akan datang.

Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan pada penyusunan mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pekalongan, November 2019

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PEKALONGAN
KEPALA,

Eddy Prawoto

NIP. 19650503 199403 1 002

<https://pekalongankota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
BAB II METODOLOGI	
II.1 Konsep dan Definisi	3
II.2 Indikator dan Variabel	4
II.3 Sumber Data	4
II.4 Metode Penghitungan IPM	4
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	
III.1 Kondisi Geografis	13
III.2 Kependudukan	13
BAB IV ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA	
IV.1 Indikator Pendidikan	15
IV.2 Indikator Kesehatan	22
IV.3 Indikator Ketenagakerjaan	23
IV.4 Status Pembangunan Manusia	26
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	31
LAMPIRAN.....	33

<https://pekalongankota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	7
Tabel 2.2 Besaran Nilai IPM dan Statusnya	8
Tabel 2.3 Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir	10
Tabel 4.1 Banyaknya Fasilitas Pendidikan dan Rasio Antara Murid Terhadap Guru dan Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2017-2018	17
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang berstatus Masih Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	18
Tabel 4.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2018	20
Tabel 4.4 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2018	22
Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2018	23
Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kota Pekalongan Tahun 2017-2018	24
Tabel 4.7 Angka Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp) di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2018	25
Tabel 4.8 Nilai IPM Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	26
Tabel 4.9 Pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2018	29

<https://pekalongankota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Masih Bersekolah di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	19
Grafik 2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2018	21
Grafik 3. Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	23
Grafik 4. Nilai IPM 6 Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018	27
Grafik 5. Nilai IPM dan Pertumbuhannya di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	28

<https://pekalongankota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kelompok Umur Tahun 2018	35
Tabel 2 Persentase Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2014-2018.....	36
Tabel 3 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	37
Tabel 4 Jumlah Kelas Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	38
Tabel 5 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	39
Tabel 6 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018	40

<https://pekalongankota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai adanya perubahan atau perkembangan dari satu periode ke periode berikutnya. Pada pembangunan manusia, maka hal tersebut masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia, baik dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial. Perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dan sosial ini, dapat dijadikan sebagai indikator. Selain hal tersebut, pembangunan manusia bisa juga mencakup dimensi yang sangat luas, yang banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Untuk itu, perlu dilakukan dengan membuat suatu alat pengukuran yang dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang presentase pencapaian terhadap sasaran ideal.

Upaya pembuatan alat ukur tersebut, adalah dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Variabel-variabel sosial dan ekonomi disusun menjadi indeks komposit, sehingga dapat diperbandingkan satu dengan lainnya, atau antara satu periode dengan periode sebelumnya. Salah satu indeks komposit yang akan digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

IPM atau HDI mulai diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan terus dikembangkan di tahun 2015 sebagai alat untuk mengetahui indikator kesejahteraan manusia. Ada tiga dimensi yang akan digunakan untuk melihat kemajuan manusia yaitu berdasarkan dimensi kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi pengetahuan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp).

IPM yang diukur (dengan ukuran angka-angka tertentu) menurut wilayah (kabupaten/kota) selama beberapa tahun, akan bermanfaat menjadi informasi atau masukan kepada pembuat keputusan dalam mencapai pembangunan manusia yang seutuhnya berdasarkan pada aspek keseimbangan, pemerataan, produktivitas dan pemberdayaan.

IPM yang merupakan salah satu alat ukur tersebut, diharapkan dapat menjadi alat untuk merangkum beberapa dimensi utama pembangunan manusia, yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Beberapa dimensi utama itu adalah kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dengan paradigma baru ini, pembangunan tidak lagi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi sudah bergeser kearah pembangunan manusia secara utuh melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Empat komponen kunci dari paradigma pembangunan manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) yaitu:

1. Produktivitas (*productivity*), yaitu penduduk harus mampu meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja.
2. Pemerataan (*Equity*), yaitu setiap penduduk harus mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial.
3. Kestinambungan (*Sustainability*), yaitu akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang saja, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik, manusia, alam harus dapat diperbarui.
4. Pemberdayaan (*Empowerment*), yaitu penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk) kehidupan mereka, serta berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

BAB. II

METODOLOGI

II.1 Konsep dan Definisi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah suatu indikator komposit tunggal yang dirangkum dari beberapa dimensi utama pembangunan manusia (dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi) yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

Ratio jenis kelamin (Sex Ratio), adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan Perempuan dikalikan 100.

Angka ketergantungan (Dependency Ratio), adalah perbandingan antara penduduk usia 0-14 tahun dan usia diatas 65 tahun terhadap penduduk usia produktif (15-65 tahun).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS), didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD, adalah proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Dasar (SD).

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, adalah proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Angka Partisipasi Murni (APM) SMU, adalah proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU).

Jumlah penduduk usia sekolah, adalah banyaknya penduduk yang berusia 7 sampai 15 tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun atau lebih.

Angka Pengangguran Terbuka, adalah perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja .

Persentase Pekerja yang setengah menganggur, adalah proporsi penduduk usia 15 tahun atau lebih yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Angka Harapan Hidup Waktu Lahir, merupakan hasil perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.

Angka Kesakitan Sesaat (Point Prevalency), adalah proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Penduduk per Puskesmas, adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas.

II.2 Indikator dan Variabel

Indikator dan variabel yang dipakai dalam IPM adalah variabel-variabel yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa dimensi utama, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan sebagai berikut :

- ***Indikator Kesehatan:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) (tahun).

- ***Indikator Pengetahuan:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun).

- ***Indikator Standar Hidup Layak:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)

II.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini adalah data olahan yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018.

II.4 Metode Penghitungan IPM

IPM disusun dari tiga komponen yaitu: komponen kesehatan, diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir; komponen pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan komponen standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan *Purchasing Power Parity* (PPP rupiah). Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat, dan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian dua hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan produktivitas, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak.

a. Komponen Kesehatan

Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth/e₀*). Angka e_0 untuk tingkat propinsi yang disajikan pada tulisan ini, merupakan hasil penghitungan tidak langsung (*indirect technique*) dengan menggunakan paket program Mortpack berdasarkan data rata-rata jumlah anak lahir hidup dan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur ibu 15-49 tahun, dan dengan memperhatikan trend data hasil Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas).

b. Komponen Pengetahuan

Komponen pengetahuan diukur dari dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah (*EYS/Expected Years of Schooling*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lamanya sekolah (*MYS/Mean Year of Schooling*), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

c. Komponen Standar Hidup Layak (*Purchasing Power Parity/PPP*)

Standar hidup layak merupakan komponen ketiga selain dua komponen diatas yang juga diakui secara luas sebagai unsur dasar pembangunan manusia. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan GDP ril per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak, BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya, sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Untuk mempermudah penafsiran, indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100).

Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh untuk masing-masing daerah/wilayah maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut, diantaranya yaitu tingkat status pembangunan manusia dan tingkat pertumbuhan IPM.

Komponen IPM adalah tingkat usia hidup manusia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Dalam pembangunan manusia, yang pertama dilakukan adalah mengusahakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” (*longevity*) yang panjang dan sehat. Usia hidup menurut UNDP diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*Life Expectancy at Birth*) yang dinotasikan dengan e_0 . e_0 ini dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode brass, varian trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen kedua dalam pembangunan manusia adalah komponen pengetahuan (*knowledge*). Komponen itu diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung

berdasarkan data Susenas KOR. Indikator angka harapan lama sekolah diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan .

Komponen ketiga dalam pembangunan manusia adalah komponen standar hidup layak, yang diukur dengan indikator rata-rata konsumsi ril yang telah disesuaikan. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur komponen ini, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, UNDP menggunakan indikator PDB perkapita ril yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per Capita*) sebagai ukuran komponen tersebut.

Kemudian untuk keperluan IPM Kabupaten/Kota, data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak, karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur daya beli penduduk. Sebagai pengganti ukuran tersebut, digunakan ukuran konsumsi perkapita ril yang telah disesuaikan. Sumber data yang telah digunakan adalah *raw data* Susenas Modul Konsumsi.

Adapun tahapan perhitungan indikator konsumsi ril per kapita yang telah disesuaikan sebagai berikut :

- Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (= **A**)
- Mendeflasikan nilai A dengan IHK provinsi yang sesuai (= **B**)
- Menghitung daya beli per unit (= **PPP/unit**). Metode perhitungan sama seperti metode yang digunakan Internasional Comparison Project (**ICP**) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul Konsumsi.
- Membagi nilai B dengan PPP/ unit (= **C**)
- Menyesuaikan nilai C dengan formula *Atkinson* sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C
- Perhitungan PPP/ unit dilakukan dengan rumus :

$$PPP/Unit = \frac{\sum_i E(i, j)}{\sum P(i, j)Q(i, j)}$$

keterangan :

E(ij) : Pengeluaran untuk komoditi j

P(ij) : Harga komoditi j

Q(ij) : Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 C_{(i)}^* &= C_{(i)} && , \text{ jika } C_{(i)} \leq Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} && , \text{ jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z) && , \text{ jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(Z) + 4(C_{(i)} - 3Z)^{1/4} && , \text{ jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z
 \end{aligned}$$

keterangan :

$C_{(i)}$: Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z : *Thres hold* atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang ditetapkan secara arbiter Rp 547.500,- per kapita setahun atau Rp. 1.500 per kapita perhari.

Indeks komponen IPM, merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimumnya dan nilai minimum indikator tersebut. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i) \text{ min}}] / [X_{(i) \text{ maks}} - X_{(i) \text{ min}}]$$

keterangan :

$X_{(i)}$: indikator ke-i (i=1,2,3,...)

$X_{(i) \text{ min}}$: Nilai Maksimum $X_{(i)}$

$X_{(i) \text{ min}}$: Nilai Minimum $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan minimum indikator $X_{(i)}$ disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel : 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Rumus perhitungan IPM

Rumus perhitungan IPM disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{Kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

keterangan :

- X₍₁₎** : Indeks Kesehatan
- X₍₂₎** : Indeks Pengetahuan/Pendidikan
- X₍₃₎** : Indeks Standar Hidup Layak

Hasil perhitungan IPM memberikan gambaran seberapa jauh suatu wilayah telah mencapai sasaran yang disentuh, yaitu angka harapan hidup 85 tahun. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standart hidup layak. Semakin dekat IPM suatu wilayah terhadap angka 100 maka semakin dekat dengan sasaran yang dicapai.

Dalam memahami makna nilai PBB melalui UNDP (*United Nation Depeloment Programme*) memberikan kualitas tingkat status yakni:

Tabel : 2.2. Besaran Nilai IPM dan Statusnya

Tingkat Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	IPM < 60
Sedang	60 ≤ IPM < 70
Tinggi	70 ≤ IPM < 80
Sangat Tinggi	IPM ≥ 80

Perhitungan Kecepatan Perkembangan IPM

Dalam menghitung kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Secara sederhana, hal ini untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Pertumbuhan IPM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

yaitu :

$$\begin{aligned} \text{IPM}_t &= \text{IPM suatu wilayah pada tahun } t \\ \text{IPM}_{t-1} &= \text{IPM suatu wilayah pada tahun } (t-1) \end{aligned}$$

Kemudian dalam menghitung masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a) Angka Harapan Hidup (e_0)

Menurut UNDP usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*Life Expectancy at Birth*). yang biasa dinotasikan dengan e_0 Karena di Indonesia tidak memiliki sistem registrasi langsung, maka digunakan metode ini dengan memakai dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup/ALH (*live births*) dan rata-rata anak yang masih hidup/AMH (*still living*) Per wanita 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan perhitungan e_0 dilakukan dengan menggunakan *software mortpack*.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)

Kedua indikator pendidikan ini dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan .

b.1) Penghitungan Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) adalah sebagai berikut :

$$\text{HLS}_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \text{ dimana:}$$

HLS_a^t adalah Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t adalah Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t adalah Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i adalah Usia (a,a+1,...+n)

b.2) Penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)

- **Langkah Pertama**, menyeleksi penduduk pada usia 25th ke atas.
- **Langkah Kedua**, menghitung lamanya sekolah.

- Jika partisipasi sekolah yaitu **tidak/belum pernah bersekolah**, maka **lama sekolah = 0**.
- Jika partisipasi sekolah yaitu **masih bersekolah** atau **tidak bersekolah lagi**, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut.

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

- **Langkah Ketiga**, menghitung rata-rata lama sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

RLS : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk_i: lama sekolah penduduk ke-*i* di suatu wilayah

n: jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Tabel : 2.3. Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
(1)	(2)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMALB/MA/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

c) Kemampuan daya beli

Ukuran pantas daya beli menggunakan variabel *purchasing power parity*, karena secara konseptual jelas lebih lengkap dalam penyeleksian taraf pembangunan manusia,. Ukuran yang digunakan dalam hal ini adalah konsumsi per kapital ril yang telah disesuaikan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data Susenas 2015.

1. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dari Susenas

- **Langkah Pertama**, hitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.
- **Langkah Kedua**, hitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.
- **Langkah Ketiga**, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan
 $(Y_t^*) = \text{rata-rata pengeluaran per kapita per bulan} \times 12 / 1000.$

2. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dalam Harga Konstan (riil)

- Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y_t}{IHK(t,2012)} \times 100$$

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK(t,2012)$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

3. Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP)

- **Langkah Pertama**, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih.

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}, \text{Keterangan:}$$

- P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah
- V_i = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah
- Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah
- Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK.

- **Langkah Kedua**, menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$\text{ParitasDayaBeli}_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

- **Langkah Ketiga**, menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Y_t^{**} : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

<https://pekalongankota.bps.go.id>

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

III.1 Kondisi Geografis

Kota Pekalongan terletak antara 6 50' 42" - 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" - 109 42' 19" Bujur Timur

Secara administrasi, wilayah Kota Pekalongan mempunyai batas-batas :

- Bagian utara : Laut Jawa
- Bagian Selatan : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang
- Bagian Barat : Kabupaten Pekalongan
- Bagian Timur : Kabupaten Batang

Kota Pekalongan memiliki ketinggian kurang lebih 1 meter dari permukaan laut. Di wilayah sebelah utara merupakan daerah pantai, sedangkan wilayah bagian tengah merupakan daerah dataran.

Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 km², yang terdiri dari tanah sawah seluas 11,52 km² (25,46 persen) dan tanah kering seluas 33,73 km² (74,54 persen). Wilayah administrasi Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara dan Pekalongan Selatan serta terdiri dari 27 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Pekalongan Utara dengan luas 24,88 km² atau sekitar 33 persen dari luas seluruh Kota Pekalongan, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Pekalongan Timur dengan luas 9,52 km² atau sekitar 21 persen dari total wilayah Kota Pekalongan.

III.2 Kependudukan

Penduduk merupakan sasaran utama pembangunan manusia, sehingga data kependudukan menjadi sangat vital dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Jumlah penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah 304.477 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 152.202 jiwa dan perempuan sebanyak 152.275 jiwa. *Sex* rasio sebesar 99,95 menunjukkan perbandingan bahwa penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa maka terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 100 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 6.729 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,90 %. Angka ini menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan penduduk sebesar 0,02% dibandingkan laju pertumbuhan penduduk tahun sebelumnya yang mencapai angka 0,92 %.

Penduduk menurut kelompok umur dapat memberikan gambaran tentang kejadian demografis (fertilitas, mortalitas dan migrasi). Hasil pengumpulan data penduduk tahun 2018 menunjukkan

bahwa persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 74.895 jiwa atau 24,60 %. Dari penduduk usia muda diatas, terdapat penduduk balita (0-4 tahun) sebesar 24.522 jiwa atau sebesar 8,05 % dari jumlah penduduk. Sedangkan penduduk pada kelompok lanjut usia (lansia) yaitu penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 15.880 jiwa atau 5,21 %. Usia produktif (umur 15-64) penduduk Kota Pekalongan mencapai 70,19 % atau sebanyak 213.702 jiwa. Dari keadaan ini dapat diketahui bahwa penduduk Kota Pekalongan dikategorikan sebagai penduduk usia muda.

<https://pekalongankota.bps.go.id>

BAB IV

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia adalah merupakan modal pembangunan bangsa. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk manusia itu sendiri, dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi tiap manusia atau rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Peningkatan pembangunan manusia dapat dilakukan melalui pendekatan kondisi kesehatan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk penghasilan dan pendapatan keluarga. Pendidikan dan kualitas individu yang berkaitan dengan tradisi, norma, produktifitas dan perilaku kehidupan, serta peningkatan usaha kesejahteraan lainnya, baik manusia sebagai diri pribadi, keluarga, masyarakat, warga negara, dan himpunan kualitas secara menyeluruh, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam bab ini dibahas tentang indikator pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan hasil keadaan manusia di Kota Pekalongan. Indikator tersebut diharapkan akan dapat mengetahui sejauh mana keadaan hasil pembangunan sumber daya manusia di Kota Pekalongan selama periode 2014 – 2018.

IV.1 Indikator Pendidikan

Dalam perkembangan negara-negara di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa, tidak semata-mata bergantung pada keunggulan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Oleh karena itu dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia yang unggul, penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan efisien, merupakan upaya yang strategis dan mendasar.

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, pemerintah telah menyusun serangkaian kebijakan, salah satu diantaranya adalah pelaksanaan “Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun“. Dengan kebijakan/program tersebut diharapkan kualitas SDM dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberi nilai lebih berkualitas terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, peningkatan wajib belajar dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun akan memberi kematangan lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan.

Upaya peningkatan pembangunan pendidikan memerlukan data yang akurat, agar diketahui berbagai macam keadaan yang mendasari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan peningkatan pembangunan pendidikan. Data yang dimaksud merupakan

indikator pendidikan, karena berfungsi memberikan indikasi atau petunjuk tentang berbagai macam dan jenis keadaan yang dimaksud.

Kaitannya dengan upaya peningkatan pembangunan manusia melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan indikator yang dapat digunakan untuk memantau keberhasilan antara lain Fasilitas Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lamanya Sekolah.

IV.1.1 Fasilitas Pendidikan

Keberadaan serta kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan berperan penting dalam peningkatan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Salah satu sarana yang penting adalah sekolah yang merupakan wahana penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal. Fasilitas pendidikan yang memadai sangat diperlukan dengan mendukung visi dan misi pembangunan pendidikan, yaitu memperluas kesempatan belajar bagi semua penduduk, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keterampilan untuk kehidupan, serta sekaligus terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah perlu menyediakan sarana belajar antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah baru, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan penambahan jumlah pendidik yang berkualitas.

Pada tabel 4.1 dibawah menunjukkan perkembangan jumlah fasilitas pendidikan di Kota Pekalongan periode 2017-2018. Jumlah fasilitas pendidikan di Kota Pekalongan pada Tahun 2018 untuk sekolah SD/MI sebanyak 147, Sekolah SLTP/ sederajat 38 sekolah dan sekolah SLTA/ sederajat 29.

Jumlah murid SD/ MI tahun 2018 bertambah 1,85 persen dibanding tahun 2017, demikian juga dengan jumlah guru yang mengalami penambahan sebanyak 6,81 persen untuk periode yang sama. Rasio antara murid-guru pada tahun 2018 mengalami pengurangan 4,64 persen sedang rasio murid-sekolah bertambah 0,92 persen.

Jumlah murid SMP/ Sederajat tahun 2018 berkurang 1,56 persen dibanding tahun 2017 sedangkan jumlah guru bertambah 4,72 persen dibanding dengan jumlah guru pada tahun 2017. Rasio antara murid-guru pada tahun 2018 mengalami pengurangan 6,03 persen demikian juga rasio murid-sekolah berkurang 1,41 persen.

Jumlah murid SMA/ Sederajat tahun 2018 bertambah 3,84 persen dibanding tahun 2017 sedangkan jumlah guru juga mengalami penurunan yakni 0,71 persen untuk periode yang sama. Rasio antara murid-guru maupun murid-sekolah, masing-masing adalah 4,59 dan 11,04 persen.

Tabel 4.1 Banyaknya Fasilitas Pendidikan dan Rasio Antara Murid Terhadap Guru dan Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2017-2018

Tingkat Pendidikan	2017	2018	Perubahan (%)
1. SD/MI			
- Jumlah Sekolah	146	147	0,68
- Jumlah Murid	31.621	32.209	1,85
- Jumlah Guru	1.746	1.865	6,81
- Rasio Murid/Guru	18,11	17,27	-4,64
- Rasio Murid/Sekolah	217	219	0,92
2. SLTP Sederajat			
- Jumlah Sekolah	38	38	0,00
- Jumlah Murid	16.160	15.907	-1,56
- Jumlah Guru	911	954	4,72
- Rasio Murid/Guru	17,74	16,67	-6,03
- Rasio Murid/Sekolah	425	419	-1,41
3. SMU Sederajat			
- Jumlah Sekolah	31	29	-6,45
- Jumlah Murid	14.324	14.874	3,84
- Jumlah Guru	981	974	-0,71
- Rasio Murid/Guru	14,60	15,27	4,59
- Rasio Murid/Sekolah	462	513	11,04

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

Kemudian dilihat dari angka rasio antara murid dan guru pada tingkat SD pada tahun 2018 tercatat sebesar 17,27. Hal ini berarti tiap 1 orang guru mengajar 17 orang murid, dibanding tahun 2017 angka rasio tersebut turun meskipun tidak signifikan. Dengan demikian berarti beban mengajar murid oleh setiap guru sedikit berkurang. Pada tingkat SMP/ Sederajat angka rasio antara murid dan guru mengalami penurunan sebesar 6,03 persen dibanding tahun 2017, dengan demikian jumlah murid yang harus diajar oleh 1 orang guru berkurang menjadi sebanyak 16 orang murid di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan gejala adanya pengurangan beban mengajar dari seorang guru yang di tahun 2017 harus mengajar 17 murid SMP/ Sederajat berkurang menjadi sekitar 16 orang murid pada tahun 2018. Pada pendidikan tingkat SMA/ Sederajat, rasio antara murid dan guru pada tingkat SMA/ Sederajat meningkat dari 14,60 pada tahun 2017 menjadi 15,27 pada tahun 2018. Hal ini menyebabkan peningkatan beban mengajar setiap guru SMA/ Sederajat yang semula seorang guru mengajar sekitar 14 murid pada tahun 2017 menjadi seorang guru mengajar sekitar 15 murid pada tahun 2018.

IV.1.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Angka partisipasi sekolah diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya penduduk yang masih bersekolah pada kelompok usia sekolah tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk yang seharusnya masih sekolah pada kelompok usia yang sama.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Berstatus Masih Sekolah Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018

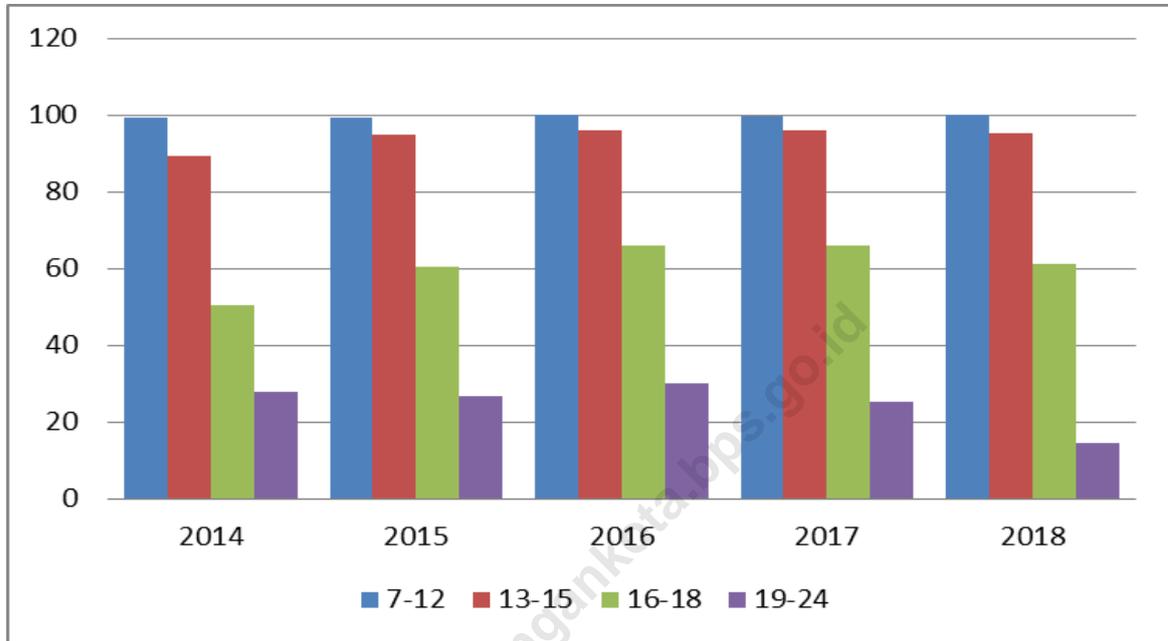
Kelompok Usia	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 – 12	99,24	99,50	100,00	99,73	100
13 – 15	89,33	95,06	96,04	95,97	95,23
16 – 18	50,65	60,66	66,07	66,08	61,32
19 – 24	28,13	26,68	30,18	25,25	14,81

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan pada tahun 2018 untuk tingkat sekolah dasar, bisa dikatakan bahwa semua penduduk usia 7 – 12 tahun (usia sekolah dasar) telah bersekolah, angka ini bertambah sebesar 0,27 persen bila dibandingkan tahun 2017 yang sudah mencapai 99,73 persen. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu tingkat SMP/ Sederajat, tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,74 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 angka partisipasi sekolah usia 13 – 15 tahun telah mencapai 95,97 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 95,23 persen. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (usia 16 – 18 tahun), yakni menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2017 angka partisipasi sekolah untuk usia 16 – 18 tahun mencapai sebesar 66,08 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 61,32 persen atau mengalami penurunan sebesar 4,76 persen. Untuk tingkat pendidikan tinggi, di tahun 2018 penduduk kota Pekalongan yang masih kuliah sudah mencapai mencapai 14,81 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan angka pada tahun 2017 yang telah mencapai 25,25 persen. Hal ini diduga karena adanya

pemindahan Kampus IAIN Kota Pekalongan ke Kajen Kabupaten Pekalongan dan adanya pada usia tersebut tidak melanjutkan sekolah/kuliah akan tetapi lebih memilih bekerja.

Grafik 1. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Masih Bersekolah di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018



Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019, diolah

IV.1.3 Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka harapan lama sekolah, yang bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren yang datanya bersumber dari Direktorat Pendidikan Islam.

**Tabel 4.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)
di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2018**

Daerah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
a. Kab. Batang	10,65	11,09	11,51	11,87	11,88
b. Kab. Pekalongan	11,93	12,00	12,15	12,16	12,17
c. Kab. Pemasang	11,26	11,86	11,87	11,88	11,89
d. Kab. Tegal	11,99	12,00	12,01	12,06	12,34
e. Kab. Brebes	11,03	11,34	11,37	11,69	12,02
f. Kota Pekalongan	11,93	12,59	12,77	12,78	12,79
g. Kota Tegal	11,96	12,46	12,88	12,89	12,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama periode tahun 2014 – 2018 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,86 persen. Pada tahun 2014, angka Harapan Lama Sekolah sudah mencapai 11,93 tahun, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,79 tahun atau tiap tahunnya angka Harapan Lama Sekolah selama periode 2014 – 2018 meningkat rata-rata 0,215 persen/tahun.

Secara umum, angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan masih tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di eks Karesidenan Pekalongan.

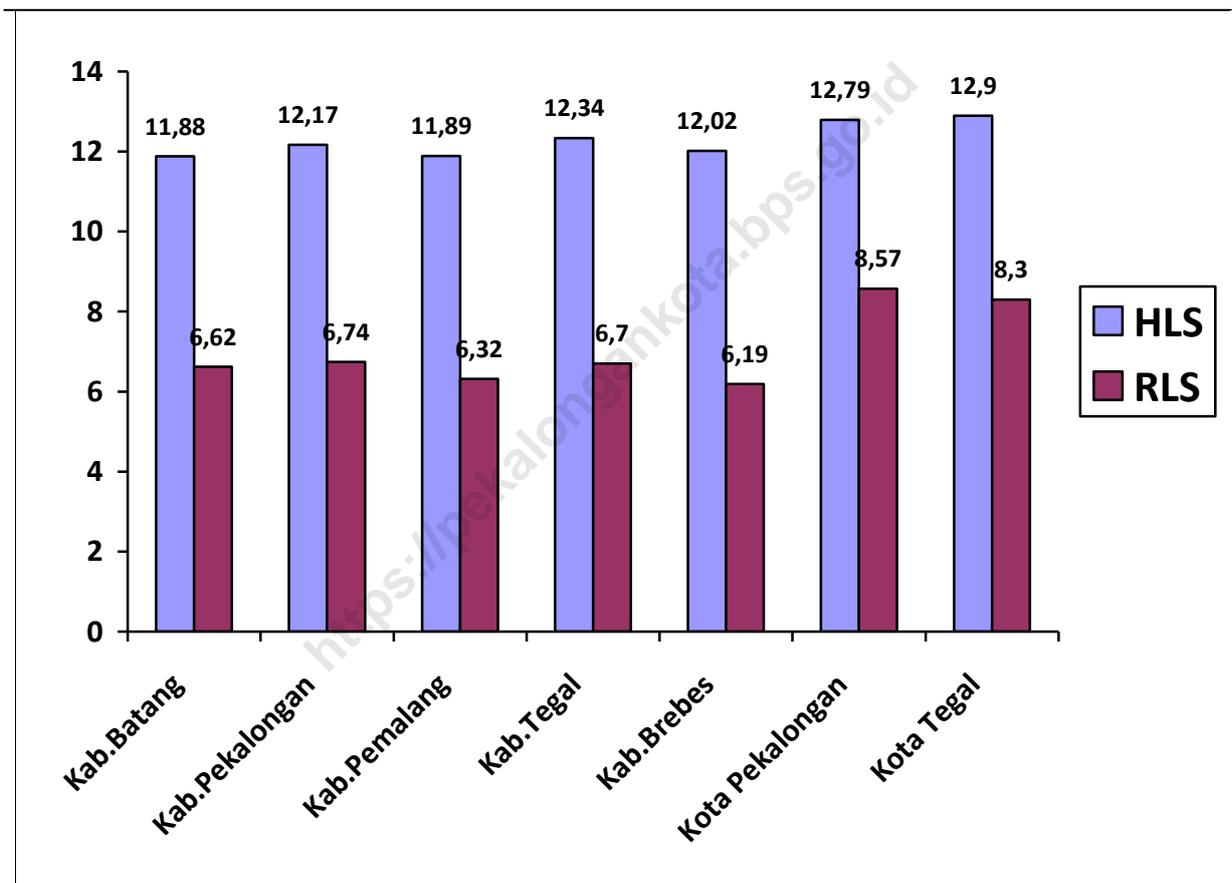
IV.1.4 Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka harapan lama sekolah, komponen IPM berupa tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah, dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kota Pekalongan.

Berdasarkan data dari Susenas tahun 2018, angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,57 tahun, angka ini berarti bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk (usia 25 tahun atau lebih) di Kota Pekalongan dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Menengah Pertama/ SMP. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2017 lalu yaitu sebesar 0,01 persen. Namun demikian untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun masih butuh waktu yang relatif lama sehingga diperlukan upaya lebih keras lagi dari pemerintah

daerah Kota Pekalongan untuk mencapai target tersebut. Upaya yang telah ditempuh seperti antara lain agar pendidikan warga Kota Pekalongan mulai pada usia dini (PAUD) diwujudkan pada setiap wilayah RW, juga kewajiban tiap sekolah menerima murid yang berasal dari warga yang tidak mampu (akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemkot Pekalongan), akan dapat mendorong angka rata-rata lama sekolah ini. Hal yang juga perlu dilakukan adalah membuat perangkat atau aturan dan petunjuk teknisnya, untuk mendorong setiap warga Kota Pekalongan berusia sekolah untuk bersekolah, minimal menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Grafik 2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, diolah

IV.2 Indikator Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya Peningkatan pembangunan manusia. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk secara fisik, dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Selain derajat kesehatan, aspek penting yang lain dari kualitas kesehatan penduduk adalah status kesehatan, yang

antara lain dapat diukur dari angka kesakitan. Di samping itu, dalam sub bab ini dibahas masalah penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.

IV.2.1 Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Pada Tabel 4.5 menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan pada tahun 2017 – 2018. Pada tahun 2018, jumlah dokter sebanyak 356 orang, Rumah Sakit 8 unit, Puskesmas sebanyak 14 unit. Jika melihat keadaan pada tahun 2017, maka jumlah dokter berkurang sebanyak 37 orang, jumlah Rumah Sakit bertambah 1 unit yaitu rumah sakit swasta, Puskesmas tidak bertambah.

Rasio jumlah dokter terhadap penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2018 mencapai angka 1 dokter berbanding 855 jiwa. Hal ini berarti bahwa 1 dokter harus melayani sekitar 855 penduduk. Angka ini jika kita bandingkan dengan tahun 2017, yang mencapai sekitar 1 dokter berbanding 768 penduduk, mengalami peningkatan, karena jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang dokter menjadi bertambah sedangkan jumlah dokter yang harus melayani berkurang sehingga harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lebih baik menjadi sedikit menurun.

Tabel 4.4 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2018

Uraian	2017	2018	Perubahan (Point)
Rumah Sakit	7	8	14,28
Dokter	393	356	-9,41
Pukesmas	14	14	0,00
Rasio Penduduk/Dokter	768	855	11,33

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

IV.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan penduduk Kota Pekalongan pada periode 2014 – 2018 menunjukkan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup di Kota Pekalongan pada periode 2014 – 2018, mengalami peningkatan dari 74,09 tahun menjadi 74,25 tahun, ini artinya bahwa, usia hidup penduduk Kota Pekalongan bertambah selama 0,16 tahun atau bertambah 0,21 persen. Secara tidak langsung, hal ini merupakan

petunjuk bahwa kualitas kesehatan penduduk Kota Pekalongan telah meningkat menjadi lebih baik. Semakin tinggi angka harapan hidup, berarti semakin tinggi pula kualitas hidup penduduk wilayah tersebut.

**Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup
Di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2018**

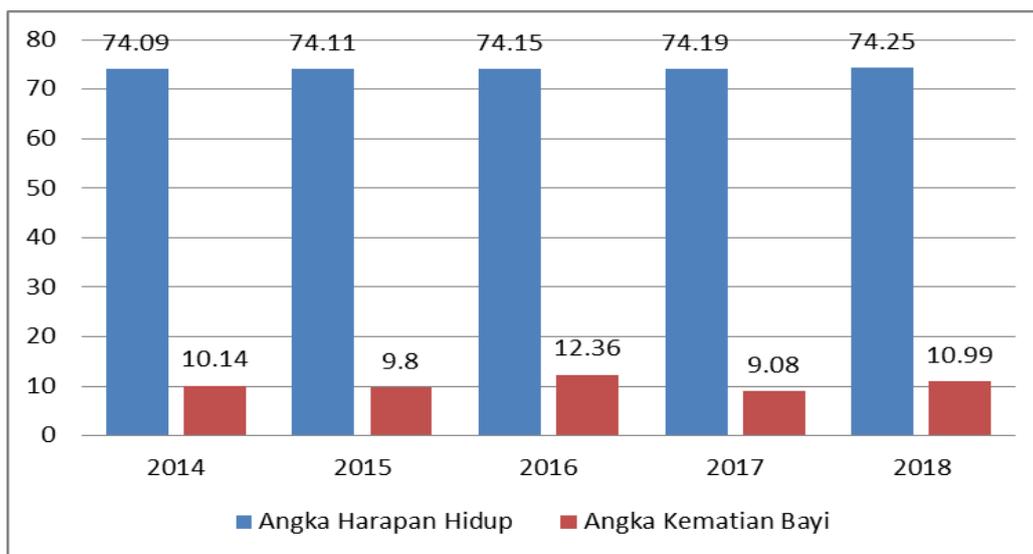
Daerah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
a. Kab. Batang	74,40	74,42	74,46	74,50	74,56
b. Kab. Pekalongan	73,33	73,35	73,41	73,46	73,53
c. Kab. Pemalang	72,64	72,77	72,87	72,98	73,11
d. Kab. Tegal	70,80	70,90	71,02	71,14	71,28
e. Kab. Brebes	67,90	68,20	68,41	68,61	68,84
f. Kota Pekalongan	74,09	74,11	74,15	74,19	74,25
g. Kota Tegal	74,10	74,12	74,18	74,23	74,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Angka harapan hidup tahun 2018 di daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah eks Karesidenan Pekalongan, relatif bervariasi antara 68,84 sampai 74,56 tahun dimana Kabupaten Batang menempati peringkat teratas sedang Kabupaten Brebes menempati peringkat paling bawah.

Angka kematian bayi di Kota Pekalongan pada tahun 2018 mencapai 10,99 setiap 100 kelahiran hidup, angka ini menunjukkan adanya penurunan secara kualitas karena adanya peningkatan dalam jumlah kematian bayi, dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 9,08 setiap 100 kelahiran hidup.

**Grafik 3. Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi
di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, diolah

IV.3 Indikator Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, maka akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Oleh karenanya, salah satu sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai, sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja.

IV.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan ketenakerjaan di Kota Pekalongan, secara selintas dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan yang disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

**Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kota Pekalongan Tahun 2017-2018**

Uraian	2017	2018
Angkatan Kerja		
- Bekerja	149.487	151.597
- Pengangguran Terbuka	7.958	9.907
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	69,28	70,21
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,05	6,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, diolah

TPAK Kota Pekalongan pada tahun 2018 sebesar 70,21 persen lebih tinggi dibanding di tahun 2017 yang telah mencapai 69,28 persen. Angka TPAK sebesar 70,21 persen berarti setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 70 orang sebagai angkatan kerja (yang bekerja dan mencari pekerjaan) dan sisanya 30 orang sebagai bukan angkatan kerja (yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, pelatihan, dsb). Hal ini dapat juga mengindikasikan adanya penambahan jumlah penduduk yang bersekolah atau mengurus rumahtangga, sebanyak 30 orang, dibandingkan dengan tahun 2017 lalu ada 31 orang yang bukan angkatan kerja dari 100 orang penduduk berusia kerja.

IV.3.2 Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Banyaknya penduduk yang berada dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah, sebab berarti mereka terpaksa menganggur. Tingkat kesempatan kerja diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) pada tahun 2018 di Kota Pekalongan sebesar 93,87 persen. TKK merupakan kebalikan dari angka tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka Kota Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir berada di bawah 7 persen. Tingkat kesempatan kerja mencapai 93,87 persen mengandung maksud bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 94 orang yang bekerja sedangkan sisanya 6 orang menganggur.

IV.3.3 Standar Hidup Layak Penduduk

Standar hidup layak merupakan komponen ketiga selain dua komponen penghitungan IPM diatas, yang juga diakui secara luas sebagai unsur dasar pembangunan manusia. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan GDP riil per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak, BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity PPP*).

- Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.
- Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100
- Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

**Tabel 4.7 Angka Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2018**

Daerah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
a. Kab. Batang	8.011.690	8.244.000	8.568.000	8.805.000	9.203.000
b. Kab. Pekalongan	8.937.570	9.208.000	9.300.000	9.702.000	10.221.000
c. Kab. Pemasang	6.910.760	7.177.000	7.447.000	7.785.000	8.186.000
d. Kab. Tegal	8.049.700	8.367.000	8.709.000	9.136.000	9.433.000

e. Kab. Brebes	8.783.610	8.898.000	9.148.000	9.554.000	9.890.000
f. Kota Pekalongan	11.006.440	11.253.000	11.721.000	11.800.000	12.312.000
g. Kota Tegal	11.519.210	11.748.000	11.849.000	12.283.000	12.830.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Standar hidup layak yang menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang telah disesuaikan untuk Kota Pekalongan pada tahun 2018 sebesar Rp 12.312.000,-. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang besarnya telah mencapai Rp 11.800.000,- mengalami kenaikan sebesar 4,34 persen.

Kemampuan daya beli masyarakat yang ada di daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah eks Karesidenan Pekalongan seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan walaupun tidak terlalu besar.

Kondisi perekonomian secara makro maupun individu akan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan terhadap paritas daya beli. Program kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi tingkat pengangguran akan dapat meningkatkan pengeluaran per kapita, yang lebih lanjut akan mampu untuk mendongkrak nilai IPM Kota Pekalongan.

IV.4 Status Pembangunan Manusia

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah berusaha dengan berbagai upaya dalam meningkatkan kondisi perekonomiannya, agar dapat lebih baik lagi dari pertumbuhan di masa-masa yang lalu.

Tahapan-tahapan pemulihan kondisi perekonomian telah dilakukan dan hasilnya pun mulai nampak. Kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia, dapat dilihat melalui besarnya IPM.

Dari hasil perhitungan IPM yang menggunakan 3 komponen indikator dan variabel pembangunan manusia, yaitu indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maka diperoleh nilai dan posisi IPM Kota Pekalongan yang tercantum pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8 Nilai IPM Kota Pekalongan
Tahun 2014 – 2018**

Tahun	Nilai IPM	Peringkat Propinsi
(1)	(2)	(3)
2014	71,53	11

2015	72,69	10
2016	73,32	9
2017	73,77	10
2018	74,24	10

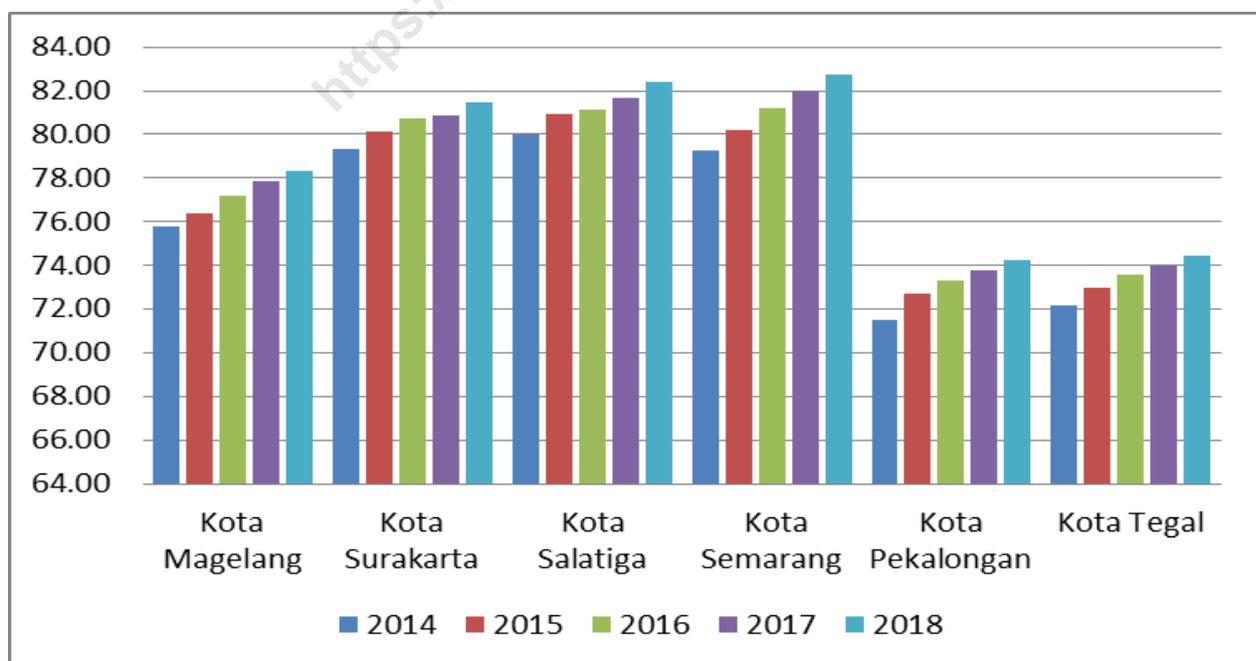
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Pada tabel 4.8 memperlihatkan bahwa, peringkat IPM di Kota Pekalongan pada tahun 2018 berada pada posisi ke 10 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Posisi tersebut masih sama dari tahun sebelumnya.

Angka IPM Kota Pekalongan periode 2014 – 2018 menunjukkan adanya peningkatan dari 71,53 pada tahun 2014 menjadi 74,24 pada tahun 2018. Status pembangunan manusia menurut UNDP, nilai IPM Kota Pekalongan periode 2014 – 2018 masuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Secara kualitas, pembangunan manusia di Kota Pekalongan di tahun 2018 masuk dalam kategori tinggi.

Nilai IPM Kota Pekalongan periode 2014-2018 tidak lebih baik dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kota-kota lain tersebut adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal. Dari kelima kota tersebut peringkat IPM Kota Pekalongan berada pada posisi paling bawah selama periode 2014-2018 yang ditunjukkan oleh Grafik 4.

Grafik 4. Nilai IPM 6 Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, diolah

Berdasarkan Grafik 4, nilai IPM Kota Pekalongan berada di bawah Kota Tegal. Walaupun nilai IPM Kota Pekalongan tidak setinggi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, setiap tahunnya nilai

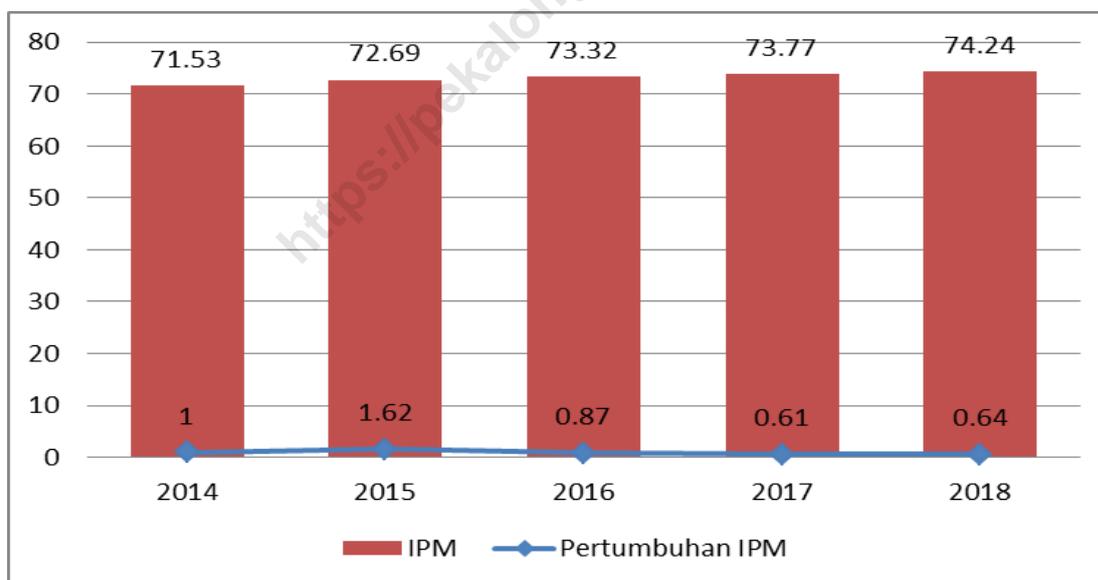
IPM Kota Pekalongan mengalami peningkatan. Untuk itu, perlu adanya upaya terus menerus dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai IPM Kota Pekalongan. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesehatan melalui penurunan rasio dokter agar dapat melayani penduduk dengan baik, peningkatan sarana pendidikan, dan juga menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhannya.

IV.4.1 Laju Pertumbuhan Pembangunan Manusia

Laju pertumbuhan pembangunan manusia dalam kurun waktu tertentu dapat diukur dengan membandingkan antara pencapaian yang telah diperoleh pada tahun t dengan capaian pada tahun sebelumnya ($t-1$) menuju titik ideal ($IPM = 100$).

Berdasarkan penghitungan oleh BPS, laju pertumbuhan pembangunan manusia Kota Pekalongan tahun 2018 sebesar 0,64. Perkembangan laju pertumbuhan pembangunan manusia Kota Pekalongan selama 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik 5.

Grafik 5. Nilai IPM dan Pertumbuhannya di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, diolah

Laju pertumbuhan pembangunan manusia selama periode 2014 – 2018 di Kota Pekalongan cenderung melambat. Hal ini memberikan gambaran bahwa selama periode tahun 2014 – 2018 pembangunan manusia di Kota Pekalongan tetap mengalami peningkatan walaupun tidak secepat tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, laju pertumbuhan pembangunan manusia Kota Pekalongan paling rendah dibandingkan enam Kabupaten/Kota di eks Karesidenan Pekalongan Lainnya. Dan jika dibandingkan

dengan laju pertumbuhan manusia Jawa Tengah, laju pertumbuhan pembangunan manusia di Kota Pekalongan berada dibawahnya.

Tabel 4.9 Pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2018

Daerah	Pertumbuhan
(1)	(2)
a. Jawa Tengah	0,85
b. Kabupaten Batang	0,76
c. Kabupaten Pekalongan	0,83
d. Kabupaten Pemalang	0,97
e. Kabupaten Tegal	1,34
f. Kabupaten Brebes	1,26
g. Kota Pekalongan	0,64
h. Kota Tegal	0,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

<https://pekalongankota.bps.go.id>

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai indeks pembangunan manusia di Kota Pekalongan pada tahun 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,64 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya meningkat sebesar 0,61 persen dimana pada tahun 2017 angka IPM sebesar 73,77 meningkat menjadi 74,24 pada tahun 2018. Sedangkan laju pertumbuhannya masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2018 yaitu 0,85.
- b. Komponen IPM di bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2018 menjadi 12,79 tahun naik 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berarti harapan penduduk Kota Pekalongan untuk bersekolah adalah hingga perguruan tinggi. Namun demikian, untuk Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2018 adalah sebesar 8,57 tahun atau berarti penduduk Kota Pekalongan rata-rata berpendidikan hingga kelas 2 SMP.
- c. Komponen IPM di bidang kesehatan, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) juga mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2017 mencapai 74,19 ,pada tahun 2018 menjadi 74,25. Yang berarti penduduk Kota Pekalongan memiliki harapan hidup hingga berusia 74 tahun lebih.
- d. Komponen IPM di bidang ekonomi, yang menggambarkan daya beli penduduk atau kemampuan belanja penduduk, melalui pendekatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan memperlihatkan adanya tren peningkatan tiap tahunnya, hingga pada tahun 2018 mencapai Rp 12.312.000 per kapita per tahun.

<https://pekalongankota.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://pekalongankota.bps.go.id>

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Kota Pekalongan
Menurut Kelompok Umur Tahun 2018

Golongan Umur	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	12.693	11.829	24.522
5 – 9	13.035	12.346	25.381
10 – 14	12.783	12.209	24.992
15 – 19	14.165	13.776	27.941
20 – 24	15.907	13.882	29.789
25 – 29	13.501	12.229	25.730
30 – 34	11.599	11.574	23.173
35 – 39	10.505	11.135	21.640
40 – 44	10.207	10.895	21.102
45 – 49	9.724	10.307	20.031
50 – 54	8.950	9.597	18.547
55 – 59	7.590	7.928	15.518
60 – 64	5.015	5.216	10.231
65 +	6.528	9.352	15.880
Jumlah	152.202	152.275	304.477

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

Tabel 2.

Persentase Penduduk Kota Pekalongan
Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2014-2018

Kelompok Usia Sekolah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 – 12	99,24	99,50	100,00	99,73	100
13 – 15	89,33	95,06	96,04	95,97	95,23
16 – 18	50,65	60,66	66,07	66,08	61,32
19 – 24	28,13	26,68	30,18	25,25	14,81

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

Tabel 3.

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018

Tingkat Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	77	77	78	80	83
SD Negeri dan Swasta	101	98	99	99	100
MI Negeri dan Swasta	47	47	47	47	47
SMP Negeri dan Swasta	28	28	27	27	27
MTs Negeri dan Swasta	9	10	10	11	11
SMA Negeri dan Swasta	10	10	9	9	9
MA Negeri dan Swasta	6	7	8	8	8
SMK Negeri dan Swasta	13	13	13	14	12

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

Tabel 4.

Jumlah Kelas Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018

Tingkat Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	254	253	281	275	316
SD Negeri dan Swasta	835	844	816	847	842
SMP Negeri dan Swasta	488	490	483	405	395
SMA Negeri dan Swasta	133	142	143	-	138
SMK Negeri dan Swasta	210	226	230	230	262

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

Tabel 5.

Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018

Tingkat Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	2.562	2.530	5.449	5.585	5.399
SD Negeri dan Swasta	22.878	22.411	21.922	21.346	21.344
MI Negeri dan Swasta	9.975	10.220	10.426	10.275	10.865
SMP Negeri dan Swasta	12.777	12.846	12.770	12.438	12.169
MTs Negeri dan Swasta	3.747	3.601	3.694	3.722	3.738
SMA Negeri dan Swasta	5.136	5.276	5.490	4.186	NA
MA Negeri dan Swasta	2.384	2.507	2.709	2.854	2.792
SMK Negeri dan Swasta	7.184	7.489	7.829	7.297	7.922

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

Tabel 6.

Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2018

Tingkat Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	421	486	480	461	514
SD Negeri dan Swasta	1.410	1.385	1.349	1.220	1.339
MI Negeri dan Swasta	537	534	536	511	526
SMP Negeri dan Swasta	769	747	768	709	752
MTs Negeri dan Swasta	228	250	244	202	202
SMA Negeri dan Swasta	289	290	298	265	254
MA Negeri dan Swasta	196	208	235	230	195
SMK Negeri dan Swasta	520	561	569	521	525

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PEKALONGAN**

Jl. Singosari Kota Pekalongan 51111
Telp (0285) 423504 Faks (0285) 4420122
Mailbox : bps3375@bps.go.id